



Pantau LPG hingga Sub Penyalur

■ Pemkab Petakan Distribusi LPG Bersubsidi

KAYONG UTARA, TRIBUN

- Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar rapat koordinasi pemetaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi dan penetapan HET LPG 3 kg bersubsidi tahun 2023 di Kabupaten Kayong Utara, Kamis (26/1).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kayong Utara Citra Duani dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani menghadiri hadir pada rapat koordinasi.

Hadir pula pihak Pertamina, Polres Kayong Utara, Forkopimda dan OPD terkait, camat terkait, kepala desa dan para peserta lainnya.

Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani menyampaikan sambutan pada rapat koordinasi pemetaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi, dan penetapan HET LPG 3 kg bersubsidi tahun 2023 di Kabupaten Kayong Utara.

"Dalam rangka distribusi elpiji 3 kg tahun 2023 yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak dan LPG 3 Kg Bersubsidi," terang



Pembentukan tim ini, sebagai langkah terpadu pemerintah daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendistribusian BBM dan LPG 3 kg

Hilaria Yusnani
Sekda Kayong Utara

Sekda Hilaria Yusnani.

"Pembentukan tim ini, sebagai langkah terpadu pemerintah daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendistribusian BBM dan LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kabupaten Kayong Utara," timpalnya.

Lebih lanjut, tahun 2022 Tim Terpadu Monitoring telah melaksanakan monitoring pendistribusian LPG 3 kg sampai ke tingkat sub penyalur.

Hasil monitoring di lapangan, ditemukan bebe-

rapa permasalahan dalam pelaksanaan pendistribusian LPG 3 kg dari pendistribusian yang tidak merata di setiap desa, penerima manfaat yang tidak tepat sasaran sampai harga jual yang tidak sesuai dengan HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pemerintah daerah mengajak PT Pertamina Patra Niaga, PT Citra Inti Nusantara dan PT Mahalli Indo Gas serta pemerintah desa untuk menetapkan kebijakan pembagian kuota.

Selain itu juga menetapkan daftar penerima manfaat yang tepat sebagai acuan dalam pendistribusian LPG 3 kg di Kabupaten Kayong Utara serta melakukan penyesuaian terhadap Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg bersubsidi dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keekonomian daerah.

"Selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tentunya pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dalam mengatur distribusi LPG yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien," tutupnya. (jov)